

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar pokok bagi masyarakat, salah satu cerminan dari kesejahteraan masyarakat adalah tingginya masyarakat yang mampu untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Pendidikan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 dikenal dalam tiga jalur yaitu jalur pendidikan informal, jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal, di mana antara jalur-jalur pendidikan tersebut saling melengkapi dalam mengembangkan sumberdaya manusia. Pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 4 diuraikan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat

¹ Walidatul Fadhilah, “Peran Pendidikan Nonformal “Roemah Tawon” Dalam Membangun Motivasi Belajar Anak Jalanan Usia MI/SD”, (*Skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017), (diakses 26 November 2019) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h.5.

kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan satuan pendidikan sejenisnya.²

Pendidikan nonformal adalah setiap aktivitas yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan dengan cara mandiri atau merupakan bagian penting dari aktivitas yang lebih luas yang sengaja dibuat dan dirancang untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan dan harapan belajarnya. Pendidikan nonformal dapat didefinisikan pula sebagai pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar (sengaja) dilakukan tetapi dilakukan tidak terlalu ketat dalam mengikuti peraturan-peraturan yang tetap tidak terikat oleh jenjang pendidikan seperti pendidikan formal di sekolah.³

Pendidikan nonformal merupakan suatu kebutuhan bagi sekelompok orang yang memerlukan layanan pendidikan sebelum mereka masuk sekolah, sesudah mereka menyelesaikan sekolah, ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan sekolah, bahkan ketika mereka sedang sekolah. Bagi mereka terutama anak-anak pesisir yang dengan segala

² Muhammad Arief Rizka, Rila Hardiansyah, “Analisis Strategi *Fun Raising* dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal pada Pusat Kegiatan Masyarakat Ceria”, *Jurnal of Nonformal Education*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2017), UNNES, h. 166.

³ M. Ihsan Dacholfany, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal di Metro Lampung (Studi Kasus Pkbn Al-Suroya)”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, h. 58.

macam alasan tidak berkesempatan sekolah, pendidikan ini perlu untuk mengganti dengan pendidikan yang setara. Semua kebutuhan belajar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan agar mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup atau dengan kata lain dapat mengatasi tantangan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut (selanjutnya disingkat SDP). Masyarakat pesisir terutama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal.⁴

Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang sebagai cerminan masyarakat marginal ini perlu dibantu, guna mengatasi berbagai masalah, seperti masalah pendidikan yang masih rendah. Di desa Tanjung Anom masih banyak anak-anak yang buta huruf, masih banyak anak-anak yang tidak bisa membaca dan berhitung, serta banyak anak-anak yang putus sekolah lebih memilih membantu orangtuanya bekerja. Anak tersebut kurang

⁴ Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 08. No. 1, (Februari 2010) IPB, h.1.

mendapat perhatian dan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan serta hak-hak mereka seolah terabaikan.

Sebagian besar anak-anak di daerah pesisir pantai Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ikut bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah. Pekerjaan yang mereka lakukan beragam mulai dari nelayan, pedagang, hingga buruh. Ada beberapa anak yang putus sekolah, mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini dikarenakan asumsi atau pola pikir mereka yang hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan materil. Ada anggapan bahwa sekolah tidak dapat menghasilkan uang, hanya dengan bekerja kita dapat menghasilkan uang. Doktrin-doktrin yang berasal dari orang tua merekalah yang secara tidak langsung memaksakan anak untuk bekerja. Kemudian hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sosial yang dapat terus menjamur di masyarakat jika pemerintah dan masyarakat lainnya tidak melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Persoalan kemiskinan juga diakibatkan dari kurang kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pentingnya pendidikan, sesungguhnya pendidikan itu merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, dan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya demi kemajuan daerah

tersebut. Dalam teori maupun konsep pembangunan, bahwa suatu daerah itu dapat dikatakan maju apabila pendidikan itu maju dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dengan daerah yang lain, salah satunya adalah dengan jalur pendidikan.⁵

Selain menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi rendahnya pendidikan yang terdapat di masyarakat pesisir, kini banyak kita temui berbagai macam model pelaksanaan pendidikan nonformal yang memang dibentuk untuk memfasilitasi keterbatasan sebagian anak-anak untuk tetap mengakses pendidikan.

Bagus Muhammad Rizal, pemuda 21 tahun adalah penggagas Sekolah Anak Bahari. Ia mengajak dan berkerjasama dengan teman-temannya yang lain untuk mendirikan sekolah nonformal di pesisir pantai Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Ia melihat bahwa pendidikan di pesisir sangat rendah, banyak anak-anak yang masih buta aksara dan anak-anak yang berhenti sekolah. Rendahnya bidang pendidikan di Desa Tanjung Anom disebabkan oleh faktor ekonomi.

⁵ Safri Miradj, Sumarno, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 1. No 1 (Maret 2014) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Universitas Negeri Yogyakarta, h. 102.

Komunitas Sekolah Anak Bahari merupakan pendidikan nonformal yang didirikan untuk meminimalisasi rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, serta meningkatkan semangat anak-anak untuk terus belajar sehingga tingkat pengangguran di wilayah pesisir bisa menurun dan anak-anak yang berhenti sekolah bisa tetap merasakan pendidikan sekolah seperti anak-anak yang lain.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal, dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL (STUDI DI SEKOLAH ANAK BAHARI DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat pesisir Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana proses peningkatan pendidikan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal di Sekolah Anak Bahari Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Sekolah Anak Bahari dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan

Dengan mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat pesisir Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendidikan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal di Sekolah Anak Bahari Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Sekolah Anak Bahari dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu yang didapat selama

perkuliahan dalam memberdayakan masyarakat pesisir mengenai rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

a. Bagi Peneliti

Agar penulis dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal pengembangan masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada Sekolah Anak Bahari dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti yang lain, penulis mencoba membandingkan dari jurnal dan skripsi yang menunjukkan kesesuaian dengan tema yang penulis teliti. Beberapa hasil penelitian pihak lain yang menunjukkan kesesuaian tema berdasarkan hasil survei penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, artikel di *Jurnal Komunikasi Pembangunan* yang ditulis oleh Siti Amanah tentang “*Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*” di IPB Bogor, 2010. Isi dari penelitian tersebut adalah strategi komunikasi pembangunan untuk wilayah pesisir hendaknya spesifik lokasi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) Program pembangunan perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menanamkan modal manusia untuk masa depan; (2) Pesan-pesan dalam komunikasi pembangunan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat nelayan, dan ditransformasikan kepada masyarakat melalui metode-metode yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat, (3) Diperlukan perencanaan yang matang dalam rancang bangun strategi komunikasi pembangunan, melibatkan peran serta masyarakat pesisir dan stakeholders terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga tindak lanjut, dan

(4) Sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholders terkait dengan masyarakat pesisir dapat menjamin keberlanjutan program pembangunan dan mendorong terwujudnya struktur sosio-ekonomi masyarakat lokal yang kuat.⁶

Penelitian tersebut di atas mengkaji strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam meneliti masyarakat pesisir yaitu, cara memberdayakan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Niswatul Imsiyah tentang “*Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember*” di Universitas Jember, 2016. Isi dari penelitian tersebut adalah gambaran pelaksanaan rehabilitasi gelandangan dan pengemis melalui program pendidikan nonformal di UPT Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember meliputi program pelatihan life skill seperti pelatihan pembuatan krupuk, pelatihan tambal ban, pelatihan tentang kewirausahaan seperti penjualan minuman kopi keliling atau dikenal dengan kopling; program bimbingan mental spritual dan motivasi hidup, dengan melalui program pendidikan nonformal tersebut diharapkan

⁶ Siti Amanah, “Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan* , Vol. 08. No. 1 (Februari 2010) IPB.

dapat mewujudkan kemandirian gelandangan dan pengemis yang tidak selalu tergantung pada orang lain, dengan demikian dapat menjadikan mereka lebih berdaya dan bisa mendapatkan kehidupan sosialnya.⁷

Perbedaan penelitian yang dikaji ialah masyarakat yang diberdayakan melalui pendidikan nonformal adalah masyarakat pesisir, di mana masyarakat pesisir mengalami persoalan rendahnya pendidikan.

Ketiga, artikel di *Jurnal Sorot* yang ditulis oleh Dahlan Tampubolon tentang “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti*” di Universitas Riau, 2003. Isi dari penelitian tersebut bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten baru mengalami pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif tinggi, dimana penduduknya sebagian besar bermukim di pedesaan dan wilayah pesisir. Masyarakat menggantungkan hidupnya di sekitar sektor perikanan. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki minat dan semangat berwirausaha yang didorong dengan kebutuhan dan biaya hidup yang semakin tinggi. Minat dan semangat berwirausaha ditunjukkan dengan partisipasi

⁷ Niswatul Imsiyah, “Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember”, *Jurnal Edukasi Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (Februari 2016) Universitas Jember.

masyarakat dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam meneliti pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang peneliti teliti ialah pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari, di mana Sekolah Anak Bahari mencoba membantu meningkatkan minat pendidikan masyarakat pesisir.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nisita Prabawati tentang “*Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*” di Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. Isi dari penelitian tersebut menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wilayah pesisir berbasis ekowisata bahari dengan hasil meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian hidup masyarakat dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Kaliwlingi. Faktor pendukung yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat memiliki kemauan untuk maju, memiliki semangat untuk mencapai keberhasilan, bersedia terlibat

⁸ Dahlan Tampubolon, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Jurnal Sorot*, Vol 8. No2 (Oktober 2003) Universitas Riau.

langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan bekerjasama dengan masyarakat lain, sumber daya alam yang melimpah, dan dorongan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yang memengaruhi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wilayah pesisir berbasis ekowisata bahari yaitu karakter dan pemikiran masyarakat yang berbeda-beda, terkendala dengan kesiapan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat yang masih rendah.⁹

Penelitian di atas sama-sama mengkaji pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir, yang membedakan dari penelitian di atas adalah objek yang diteliti adalah pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karena pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. "Pemberdayaan bertujuan

⁹ Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari Di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah", (*Skripsi Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta* 2018), (diakses 26 November 2019).

untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung”.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.¹¹

Pemberdayaan masyarakat suatu rangkaian tindakan sistematis yang melibatkan komponen organisasi formal maupun informal. Pemberdayaan adalah suatu gerakan untuk menghimpun partisipasi aktif masyarakat didalamnya untuk bergerak bersama dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan tapi juga agen pembangunan itu sendiri.¹²

Pemberdayaan (*empowerment*) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan

¹⁰ Dahlan Tampubolon, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Jurnal Sorot*, Vol. 8, No. 2 (Oktober 2003) Universitas Riau, h. 1-190.

¹¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, Oktober 2017), cet-1, h. 23.

¹² Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jawa Tengah : Desa Pustaka Indonesia 2019), h. 11.

dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.¹³

Dwidjowijoto mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: 1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan 2) usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan sekelompok masyarakat, yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

¹³ Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1 (Februari 2010) IPB, h. 4-5.

¹⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*,... h. 23-24.

Gagasan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantages*).¹⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun partisipasi aktif masyarakat didalamnya untuk bergerak bersama dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Masyarakat dalam hal ini hanya berperan sebagai obyek pembangunan tapi juga agen pembangun itu sendiri. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu membuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pada potensi dan kebutuhan masyarakat didalamnya. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut juga harus didukung dengan fasilitas berupa anggaran biaya, baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dibuat harus memiliki cara kerja yang efektif dan efisien sehingga mudah untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi dalam masyarakat. memberdayakan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang pada saat ini belum mampu

¹⁵ Jim Ife, *Comamunity Development*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), cetakan ke-3, h. 130.

membebaskan dirinya dari kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁶

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu menghasilkan produk dan mendapatkan manfaat dari produk yang mereka hasilkan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan, agen pemberdayaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan dengan melihat pada hakikat dan konsep pemberdayaan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, bakat, masalah, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang bersifat pemaksaan harus dihindari karena pemaksaan bukan ciri dari pemberdayaan.
- 2) Pemberdayaan dilandaskan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan kebutuhan dan potensinya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang

¹⁶ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*,... h. 11-12.

¹⁷ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*,..... h. 36-39.

masih tertinggal dan belum terbuka pada perubahan, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak di permukaan. Agen pemberdayaan perlu melakukan observasi secara tepat dan akurat. Dalam hal ini, agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan sasaran.

- 3) Sasaran pemberdayaan merupakan subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, musyawarah mufakat, dan kearifan lokal lainnya yang merupakan bagian dari jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- 5) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang kompleks.
- 6) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu

dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang tertanam lama.

- 7) Pemberdayaan tidak bisa dilakukan salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- 8) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- 9) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki hasrat untuk belajar secara berkelanjutan dan terus menerus. Individu dan masyarakat perlu dilatih untuk terbiasa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di sekitar. Sumber belajar tersebut dapat berupa pengalaman, kondisi lingkungan, teknik, bahan baku, dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja.
- 10) Pemberdayaan perlu memperhatikan keragaman budaya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 11) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.

- 12) Perlunya menanamkan jiwa kewirausahaan pada sasaran sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan dapat dimulai dari kemauan untuk berinovasi, keberanian untuk mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, dan mengembangkan jaringan dan mitra sebagai salah satu hal yang esensial untuk memudahkan promosi dan pertukaran dalam era globalisasi.
- 13) Agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan (permintaan) masyarakat. Dalam konteks ini, agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator.
- 14) Pemberdayaan hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang ada dan terkait dengan masyarakat mau berpartisipasi, mulai dari unsur pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, relawan dan anggota masyarakat itu sendiri. Pihak-pihak yang berpartisipasi dilibatkan sesuai dengan peran, kemampuan (bidang), dan wewenang yang diberikan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan terbagi menjadi 5:¹⁸

- 1) Penayadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu khususnya dalam pendidikan masyarakat harus dibangunkan dari tidurnya, sehingga memiliki kesadaran dan tidak memiliki sikap

¹⁸ M. Ihsan Dacholfany, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus PKBM Al-Suroya)", *Jurnal Tapis*, Vol. 02, No. 01, (Januari 2018), Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, h. 51-57.

ketergantungan dengan siapapun. Masyarakat yang sadar mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya dan menemukan sumber daya yang ada di tempat itu yang kemungkinan sampai saat ini belum pernah dipikirkan.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan keterampilan-keterampilan. Kemampuan berpikir kreatif tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi perlu adanya persiapan, salah satunya melalui proses pendidikan. Dengan harapan pendidikan itu akan menjadi modal bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan dan diharapkan. Pertemuan-pertemuan informal (pelatihan) dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka dengan demikian diharapkan dapat membina dan menghasilkan sumber daya manusia, sehingga menghasilkan alumni yang bermutu dengan memiliki wawasan ilmu pengetahuan, skill, teknologi dan punya bekal iman dan takwa, sehingga dapat menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama, moral dan akhlak mulia sesuai dengan norma aturan agama maupun pemerintah.

3) Pengorganisasian dan Kontruksi

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih

keterampilan tapi juga harus diorganisir dan dikonstruksi. Dengan organisasi berarti segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur ada pembagian tugas di antara masyarakat kemudian akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. Sedangkan konstruksi maksudnya agar adanya tahap ide, perencanaan, kegiatan pengembangan program, penganggaran dan pengadaan sumber daya hingga implementasi yang lebih menekankan pada keinginan nyata atau kebutuhan nyata masyarakat, sehingga dengan adanya perorganisasian dan konstruksi yang benar akan menghasilkan harapan yang diinginkan.

4) Pengembangan Kekuatan dan Inovasi

Kekuatan berarti kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi orang-orangnya akan merasa tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan. Dengan memberi kekuatan masyarakat akan menjadi percaya diri untuk mewujudkan potensinya dan mewujudkan dirinya, sehingga dorongan itu akan berkembang dan menjadi matang. Dengan harapan kekuatan dan inovasi yang ada akan menimbulkan pembaruan yang lebih baik dan selain itu harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut selama tidak melanggar norma agama.

5) Membangun Dinamik

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri bukan di luar masyarakat. Untuk dapat mempertahankan keberadaan organisasi langkah yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin adalah dengan cara memahami serta dapat mengidentifikasi informasi yang berkualitas, sehingga dapat memecahkan masalah dan tantangan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian akan menghasilkan kinerja yang baik dan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dubois dan Miley menjelaskan empat cara untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:¹⁹

- 1) Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk: merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama pada sasaran.
- 2) Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk: menghormati harga diri sasaran, mempertimbangkan

¹⁹ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*, h. 99.

keragaman individu, fokus pada kepentingan dan kebutuhan sasaran, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki sasaran.

- 3) Terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi sasaran dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak sasaran, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasi.
- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan merumuskan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk deskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana

program pembangunan dan bukan sekedar objek pembangunan.²⁰

Strategi perencanaan dan aksi pengembangan masyarakat menurut Moris dan Binstock, yaitu: 1) Modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya; 2) Mengubah kondisi sosial dengan Mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal; 3) Reformasi Peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.²¹

2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu kemiskinan struktural, superstruktural, dan kultural.²²

- a. Kemiskinan struktural adalah struktur sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan,

²⁰ Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*,..... h. 101.

²¹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yaysan Pustaka Obor, 2014), Cet ke-1, h. 60.

²² Deta Rahmanto, Endang Purwaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016) Universitas YARSI Jakarta, h. 114.

ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan, khususnya sumberdaya alam.

- b. Kemiskinan superstruktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat nelayan.
- c. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu yang bersangkutan sulit keluar dari kemiskinan karena faktor tersebut tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan.

Masyarakat pesisir terutama nelayan kecil, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal. Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil merupakan persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir.²³

3. Pendidikan Nonformal

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26, bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang

²³ Siti Amanah, "Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 08, No. 1 (Februari 2010) IPB.

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.²⁴

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan sekolah, baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 istilah pendidikan luar sekolah diperkenalkan melalui istilah pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan di masyarakat secara terstruktur dan berjenjang. Adapun pendidikan informal adalah jalur

²⁴ Niswatul Imsiyah, "Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember", *Jurnal Edukasi Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (Februari 2016) Universitas Jember, h. 83-94.

pendidikan yang diselenggarakan seperti halnya mengelola pendidikan di lingkungan keluarga.²⁵

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari aktifitas yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani belajar peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal melayani pendidikan kepada masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak.²⁶

Pendidikan nonformal memiliki peran besar sebagai agen bagi pengembangan personal dan sosial (transformasi sosial). Setiap orang (individu) selalu hidup dalam konteks dengan kelompok masyarakat dimana mereka hidup. Pendidikan yang dipengaruhi pandangan *progresivisme* melihat tujuan pendidikan bersifat ganda yaitu peningkatan pengembangan diri individu dan sekaligus peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik.²⁷

²⁵ Durotul Yatimah dan Kamadi, *Pendidikan Nonformal dan Informal Dalam Bingkai Pendidikan Sepanjang Hayat*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 4.

²⁶ Mundzir, "Pendidikan Nonformal Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)*, (September 2010), Universitas Negeri Malang, (diakses pada 26 November 2019), h. 8.

²⁷ Sodik A. Kuntoro, "Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 (2006), Universitas Negeri Yogyakarta, h.16.

Program pendidikan nonformal ada bermacam-macam. Pasal 26 ayat 3 menyebutkan beragam program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.²⁸

Berbagai corak ragam program pendidikan nonformal di masyarakat, yaitu:²⁹

1. Pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang meliputi:
 - a) Program pasca keaksaraan
 - b) Program pendidikan keaksaraan
 - c) Program pendidikan peningkatan pendapatan
 - d) Program peningkatan mutu hidup
 - e) Program pengembangan minat individu
 - f) Program berorientasi masa depan
2. Pendidikan orang dewasa (*adult education*)
 - a) Program keaksaraan (*adult literacy*)

²⁸ Sodiq A. Kuntoro, "Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 (2006), Universitas Negeri Yogyakarta, h.15.

²⁹ Durotul Yatimah dan Kamadi, *Pendidikan Nonformal dan Informal Dalam Bingkai Pendidikan Sepanjang Hayat*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 16.

- b) Program pasca keaksaraan (paca pendidikan dasar bagi orang dewasa)
 - c) Pendidikan pembaharuan
 - d) Pendidikan kader organisasi
 - e) Pendidikan populer
3. Program-program pendidikan nonformal yang diselenggarakan di masyarakat:
- a) Pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara)
 - b) Pendidikan anak usia dini
 - c) Pendidikan kesetaraan
 - d) Pendidikan pemberdayaan perempuan
 - e) Pendidikan keterampilan hidup
 - f) Pendidikan kepemudaan
 - g) Pembinaan kelembagaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (kursus-kursus).

Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan nonformal di Indonesia, yaitu:³⁰

- 1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal: adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta

³⁰ Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan "Pada Pendidikan Nonformal"*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h. 13-14.

fasilitas pengembangan sumberdaya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional.

- 2) Balai Penembangan Kegiatan Belajar (BPKB): adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dibidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dan karakteristik propinsinya.
- 3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB): adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan potensi lokal setiap daerah.
- 4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat.

- 5) Lembaga PNF sejenis: adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi *life skills*/keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori di atas, seperti: LPTM, Organisasi Perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Agar pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi dasar yaitu:³¹

- 1) Pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*), masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan dan masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya.
- 2) Pendekatan partisipatif (*participatory approach*), mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pendekatan kolaboratif (*collaborative approach*), dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi.

³¹ Hiryanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal", *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul DIY*, (22 November 2008), h. 04-05.

- 4) Pendekatan berkelanjutan (*continuing approach*), yaitu pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok.
- 5) Pendekatan budaya (*cultural approach*), penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan lima pendekatan di atas, jika dipahami betul oleh para agent pembaharu (*social change*), termasuk didalamnya tenaga kependidikan pendidikan Nonformal, akan memberikan kemudahan dalam menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah yang sesuai serta dibutuhkan warga masyarakat. Artinya program pendidikan yang dilaksanakan menyentuh dan mengangkat warga belajar/masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), kesadaran akan lingkungan sosialnya atau warga belajar/masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya (memberdayakan dirinya).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan tentang pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

a) Observasi

Menurut Supriadi bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³

³² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet ke-1, h. 04.

³³ Muhammad Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), cetakan pertama, h. 71.

Pada observasi ini penulis mengadakan observasi partisipatif pasif yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan mengamati keadaan masyarakat pesisir di sekitar Sekolah Anak Bahari Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁴ Dalam observasi ini penulis langsung melakukan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian yang dilakukan di Sekolah Anak Bahari.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.³⁵

Menurut Nasution wawancara dilakukan dengan tiga bentuk yaitu: (1) wawancara berstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti; dan (2) wawancara semi terstruktur bersifat fleksibel dan tidak kaku, peneliti bebas dalam bertanya dan mengatur alur wawancara selama tidak keluar dari tema. (3) wawancara tidak berstruktur timbul

³⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,... h. 22.

³⁵ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES 1989), cet ke-1, h. 192.

apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian.³⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur artinya wawancara yang dilakukan lebih fleksibel dan bebas dalam bertanya agar menemukan permasalahan maupun informasi secara luas namun tidak keluar dari tema yang diteliti. Adapun yang menjadi informan terdiri dari pihak Komunitas Sekolah Anak Bahari seperti ketua dan relawan yang ikut melaksanakan kegiatan, masyarakat pesisir Kampung Tanjung Kait seperti anak-anak yang melakukan kegiatan di Sekolah Anak Bahari dan orangtua anak yang merasakan manfaat dari adanya kegiatan pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari, serta tokoh masyarakat RW dan Kepala Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Peneliti melakukan wawancara dengan membawa pedoman wawancara yang sudah disiapkan, wawancara dilakukan dengan merekam dan mencatat pembicaraan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis.

c) Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk menyatakan bahwa dokumen berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan

³⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,.... h. 23.

atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁷

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa dokumentasi seperti arsip, struktur kepengurusan dan foto kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Anak Bahari.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³⁸

Penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara, dan hasil observasi langsung. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendidikan Nonformal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.³⁹

³⁷ Muhammad Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif*,... h. 74.

³⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007), h. 79.

³⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*,..... h. 79.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan buku-buku, jurnal, artikel-artikel, karya ilmiah dan dari internet yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰

Dalam penelitian ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif akan menggunakan analisis data interaktif dengan model Miles dan Huberman dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, untuk selanjutnya

⁴⁰ Muhammad Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif*,.... h. 84.

dirangkum. Reduksi data merupakan analisis penajaman untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu Sekolah Anak Bahari di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang berupa kegiatan dari pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat. Penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian kita mendapat banyak data. Dalam penyajian data akan terlihat dengan jelas data tersusun secara sistematis.⁴²

Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian data yang berupa penjelasan mengenai pendidikan nonformal di Sekolah Anak Bahari dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta keberhasilan dari pendidikan nonformal tersebut.

⁴¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,.... h. 37.

⁴² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,.... h. 37-38.

c. Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan dengan cara merefleksi kembali dan triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat dicapai.⁴³

Penulis memberikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh berasal dari kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengamatan pada saat kegiatan berlangsung. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis permasalahan yang didapat di lapangan setelah itu dijabarkan dan diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada dasarnya terisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Karena, untuk mempermudah penulis dalam menyusun. Hal ini juga dilakukan agar pembahasan setiap

⁴³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,.... h. 38.

bagian saling berkaitan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah:

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian. Berisi tentang gambaran umum Desa Tanjung Anom terdiri dari beberapa sub yakni jumlah penduduk Desa Tanjung Anom, kondisi pendidikan Desa Tanjung Anom, kondisi sosial Desa Tanjung Anom, kondisi ekonomi Desa Tanjung Anom dan struktur pemerintahan Desa Tanjung Anom.

BAB III Menjelaskan tentang pendidikan nonformal di Sekolah Anak Bahari yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian. Bab ini dibagi beberapa sub yakni sejarah Sekolah Anak Bahari, visi dan misi Sekolah Anak Bahari, tujuan Sekolah Anak Bahari, struktur kepengurusan Sekolah Anak Bahari, relawan pengajar (*volunteer*) Sekolah Anak Bahari, program-program Sekolah Anak Bahari, Fasilitas sarana prasarana Sekolah Anak Bahari dan sumber pendanaan Sekolah Anak Bahari .

BAB IV Menjelaskan hasil lapangan serta analisis peningkatan pendidikan nonformal, faktor pendukung dan penghambat Sekolah Anak Bahari dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Tanjung Anom, Kecamatan

Mauk melalui pendidikan nonformal di Sekolah Anak Bahari. Bab ini terdiri beberapa sub yakni manfaat pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari bagi masyarakat pesisir, faktor pendukung dan penghambat Sekolah Anak Bahari dan perubahan sosial dari pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendidikan nonformal Sekolah Anak Bahari.

BAB V Penutup yang berisikan rangkaian kesimpulan yang didapat dalam penelitian, dan saran-saran.